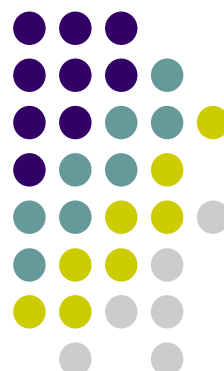


**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALU**



**Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Tahun 2021**

Tahun Anggaran 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palu dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota Palu Tahun 2021 merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada Tahun 2021. Laporan Akuntabilitas Bappeda Kota Palu Tahun 2021 ini merupakan laporan kinerja tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda 2016-2021. Penyusunan ini, mengacu pada Perpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang intinya menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah mulai pejabat eselon IV keatas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) yang telah disepakatinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palu yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palu, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta pengukuran pelaksanaan program dan kegiatan yang secara maksimum menggambarkan kinerja outcomenya dan diharapkan akan meningkat pada tahun berikutnya.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Bappeda sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Palu, Februari 2022

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Palu



Drs. ARFAN, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19720414 199203 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kota Palu Tahun 2021 dengan sasaran strategis Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan Terwujudnya sistim tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	Target Renstra	Realisasi	Capaian
1	2	3				
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu	Penilaian Inspektorat Kota Palu	BB		
2	Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah program pada RPJMD x 100%	100%	94,78	94,78
			Jumlah indikator program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / jumlah indikator program pada RPJMD x 100%			
			Jumlah target program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah target program pada RPJMD x 100%			
		Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS	Jumlah program yang ada di PPAS yang sesuai dengan RKPD / jumlah program pada RKPD x 100%	100%	94,78	94,78
			Jumlah indikator program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah indikator program pada RKPD x 100%			
			Jumlah target program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah target program pada RKPD x 100%			

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil analisis pencapaian kinerja Bappeda Kota Palu Tahun 2021 terhadap indikator kinerja utama yaitu 1. Presentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah meunjukkan capaian kinerja sebesar 94,78% atau dengan kinerja berhasil.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu	2
1.3 Permasalahan Utama dan Isu Strategis	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	4
2.2 Perjanjian Kinerja	4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	6
3.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu	6
3.1.1 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021	6
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021	8
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2016-2021	8
3.1.4 Faktor Penyebab yang Mempengaruhi Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja serta Solusinya	9
3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	9
3.1.6 Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2021	10
3.2 Realisasi Anggaran	11
3.2.1 Belanja Langsung	11

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

3.2.2 Belanja Tidak Langsung	13
BAB IV PENUTUP	15
LAMPIRAN	
- Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2021	
- Hasil Evaluasi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2021	
- Indikator Kinerja Utama (IKU)	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Palu	4
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	5
Tabel 3.1	Realisasi IKU Tahun 2021	6
Tabel 3.2	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021	7
Tabel 3.3	Capaian Sasaran Strategis Terpenuhinya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	7
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021	8
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2016-2021	8
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2021 dengan Realisasi Capain Target Kinerja Tahun 2021	10
Tabel 3.7	Realisasi dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021	10
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021	12
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2021	14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya dan pada Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,

pelaporan kinerja dan tata cara reviuatas laporan kinerja instansi pemerintah.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang perencanaan pembangunan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan Penetapan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu disusun dengan maksud dan tujuan, antara lain :

1. Menjadi pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari dana APBD;
2. Memudahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Untuk mengukur kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur perencanaan pembangunan;

4. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
5. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah kota.

2. Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi, meliputi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Permasalahan Utama dan Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Palu dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah belum maksimal
 - Belum optimalnya proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
 - Belum tersedianya pejabat fungsional perencana dan pengolah data dan informasi;
 - Pemahaman aparatur tentang perencanaan pembangunan daerah belum merata;
 - Terjadinya perubahan regulasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - Masih terdapat inkonsisten pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan;
 - Hasil evaluasi dan pengendalian belum secara maksimal digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah
 - Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan data dan informasi
 - Pengelolaan data ditangani masing-masing OPD dan belum terintegrasi berbasis teknologi informasi, dan terstandarisasi;
 - Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi dalam mendukung tugas sebagai unsur penunjang perencanaan daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut dengan menggunakan teknik analisis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan maka disusunlah isu-isu strategis

yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan, sebagai berikut :

1. Konsistensi perencanaan pembangunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan;
2. Ketersediaan sumber daya pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan yang proporsional sesuai kebutuhan;
3. Peningkatan serta pemanfaatan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan yang belum secara optimal bisa terpenuhi;
4. Pemenuhan kebutuhan SDM maupun sarana penunjang;
5. Hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya di gunakan sebagai dasar perencanaan, dan penganggaran;

1.5 Landasan Hukum

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu Tahun 2021 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan kinerja dan Pelayanan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005– 2025;
 9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10); dan

11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8).

1.6 Sistematika Penulisan

Lakip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, Permasalahan utama dan isu strategis, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran, IKU dan Program kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini, Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah, realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian serta kesimpulan serta langkah langkah akan di ambil di tahun mendatang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan Penutup dan Simpulan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu

Adapun tujuan utama dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu adalah mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Palu Tahun 2016 - 2021.

Tujuan :

- Meningkatkan perencanaan pembangunan yang baik dan berkualitas
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

Sasaran :

- Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
- Terwujudnya sistim tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

Indikator :

- Presentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
- Nilai Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

RPJMD 2021 - 2026 Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut.

Tujuan :

- Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel
- Meningkatnya Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah

Sasaran :

- Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel
- Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah

Indikator Tujuan/Sasaran :

- Nilai Reformasi Birokrasi Bappeda Kota Palu
- Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu

Indikator Tujuan/Sasaran :

- Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
- Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
- Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS

2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Bappeda Kota Palu serta RPJMD Kota Palu tahun 2016 – 2021 dan 2021-2026. Adapun Indikator kinerja utama Bappeda Kota Palu ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Palu
RPJMD 2016 – 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA
1	2	3	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	$(\text{Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD}) + (\text{Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS}) = (K1 + K2 + K3) + (K4 + K5 + K6) / 6$
			Jumlah program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah program pada RPJMD x 100%
			Jumlah indikator program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / jumlah indikator program pada RPJMD x 100%
			Jumlah target program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah target program pada RPJMD x 100%
			Jumlah program yang ada di PPAS yang sesuai dengan RKPD / jumlah program pada RKPD x 100%
			Jumlah indikator program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah indikator program pada RKPD x 100%
			Jumlah target program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah target program pada RKPD x 100%
2	Terwujudnya sistem tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Hasil Penilaian Inspektorat Kota Palu

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Palu
RPJMD 2021 - 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA
1	2	3	
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu	Penilaian Inspektorat Kota Palu
2	Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah program pada RPJMD x 100%
			Jumlah indikator program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / jumlah indikator program pada RPJMD x 100%
			Jumlah target program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah target program pada RPJMD x 100%
		Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS	Jumlah program yang ada di PPAS yang sesuai dengan RKPD / jumlah program pada RKPD x 100%
			Jumlah indikator program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah indikator program pada RKPD x 100%
			Jumlah target program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah target program pada RKPD x 100%

2.3 Perjanjian Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu telah membuat perjanjian kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat Perangkat Daerah Kota Palu yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Bappeda Kota Palu Tahun 2016 – 2021 dan 2021-2026.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Perjanjian Kinerja tingkat Bappeda Kota Palu Tahun 2021 yang telah ditandatangani adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
RPJMD 2016 - 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA
1	2	3	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	$(\text{Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD}) + (\text{Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS}) = (K1 + K2 + K3) + (K4 + K5 + K6) / 6$
			Jumlah program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah program pada RPJMD x 100%
			Jumlah indikator program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / jumlah indikator program pada RPJMD x 100%
			Jumlah target program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah target program pada RPJMD x 100%
			Jumlah program yang ada di PPAS yang sesuai dengan RKPD / jumlah program pada RKPD x 100%
			Jumlah indikator program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah indikator program pada RKPD x 100%
			Jumlah target program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah target program pada RKPD x 100%
2	Terwujudnya sistem tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Hasil Penilaian Inspektorat Kota Palu

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
RPJMD 2021 - 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA
1	2	3	
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu	Penilaian Inspektorat Kota Palu
2	Meningkatkan keselarasan	Tingkat keselarasan RKPD terhadap	Jumlah program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah program pada RPJMD x 100%

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA
1	2	3	
	dokumen perencanaan pembangunan daerah	RPJMD	Jumlah indikator program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / jumlah indikator program pada RPJMD x 100%
			Jumlah target program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah target program pada RPJMD x 100%
		Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS	Jumlah program yang ada di PPAS yang sesuai dengan RKPD / jumlah program pada RKPD x 100%
			Jumlah indikator program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah indikator program pada RKPD x 100%
			Jumlah target program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah target program pada RKPD x 100%

Dalam perjanjian kinerja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu pada Tahun 2021, telah menyesuaikan dengan Program dan Kegiatan yang ada dalam Renstra Bappeda :

1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

* Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA – SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-P SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
- **Administrasi keuangan perangkat daerah**
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
- **Administrasi umum perangkat daerah**
- Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

- Penyediaan bahan logistic kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
- Fasilitasi kunjungan tamu
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air/listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

1.2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

*** Penyusunan, perencanaan dan pendanaan**

- Analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah
- Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya
- Pelaksanaan konsultasi public
- Koordinasi pelaksanaan forum SKPD/ Lintas SKPD
- Pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota
- Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

- Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota
- * **Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah**
 - Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
 - Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
 - Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten kota
- * **Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota**
 - Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten kota
 - Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah.

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA****3.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu.**

Capaian kinerja realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perbandingannya.

3.1.1 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2021 di gambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1
Realisasi IKU Tahun 2021**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGE T	REALI SASI	FORMULA
1	5	6			
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu	BB		Hasil Penilaian Inspektorat Kota Palu
2	Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%	94,786	Jumlah program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah program pada RPJMD x 100%
					Jumlah indikator program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / jumlah indikator program pada RPJMD x 100%
		Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS	100%	94,78	Jumlah target program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah targrt program pada RPJMD x 100%
					Jumlah program yang ada di PPAS yang sesuai dengan RKPD / jumlah program pada RKPD x 100%
Jumlah indikator program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah indikator program pada RKPD x 100%					

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGE T	REALI SASI	FORMULA
1	5	6			
					Jumlah target program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah target program pada RKPD x 100%

A. Capaian Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis. Perumusan Indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

Adapun predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Skalanilai (%)	Kesimpulan evaluasi
1	85–100	SangatBerhasil
2	70–84,99	Berhasil
3	55–69,99	CukupBerhasil
4	<54,99	TidakBerhasil

Secara rinci capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Interval (%)			
					<54,99	55-69,99	70-84,99	85-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel.	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu.	BB						√
Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD/Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS	100%	94,78	94,78				√

Evaluasi Capaian Sasaran Strategis

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 untuk sasaran strategis **“Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah”** dengan indikator kinerja utama yaitu Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD/Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS, angka capaian kinerja sasarannya sebesar 94,78% dengan predikat **Sangat Berhasil**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	Target Renstra	Realisasi	Capaian
1	2	3				
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu	Penilaian Inspektorat Kota Palu	BB		
2	Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah program pada RPJMD x 100%	100%	94,78	94,79
			Jumlah indikator program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / jumlah indikator program pada RPJMD x 100%			
			Jumlah target program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah target program pada RPJMD x 100%			
		Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS	Jumlah program yang ada di PPAS yang sesuai dengan RKPD / jumlah program pada RKPD x 100%	100%	94,78	94,78
			Jumlah indikator program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah indikator program pada RKPD x 100%			
			Jumlah target program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah target program pada RKPD x 100%			

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap konsistensi program adalah sebagaiberikut :

- $K1 = \frac{352}{393} \times 100\% = 89,57\%$
 - Program RKPD yang sesuai dengan program pada RPJMD sebanyak 352 dari total program RPJMD sebanyak 393 program atau sebesar 89,57 %
- $K2 = \frac{352}{393} \times 100\% = 89,57\%$
 - Indikator program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD sebanyak 352 indikator, dari total 393 indikator yang terdapat pada RPJMD sehingga tingkat kesesuaiannya mencapai 89,57%,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

- $K3 = \frac{352}{393} \times 100\% = 89,57\%$
 - jumlah target pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD sebanyak 352 target, dari total 393 target yang terdapat pada RPJMD sehingga tingkat kesesuaiannya mencapai 89,57%,
- $K4 = \frac{171}{171} \times 100\% = 100\%$
 - Program PPAS yang sesuai dengan program RKPD sebanyak 17 program, total program pada RKPD sebanyak 171 program atau sebesar 100%.
 - Indikator dan target pada PPAS yang sesuai dengan RKPD sebanyak 171 indikator target , total indicator target RKPD sebanyak 171 atau sebesar 100%.
- $K5 = \frac{171}{171} \times 100\% = 100\%$
- $K6 = \frac{171}{171} \times 100\% = 100\%$
 - Tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD/Tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap PPAS sebesar 94,78 %.
- Total : (K1+K2+K3) + (K4+K5+K6) /6
 - (89,57+89.57+89,57) + (100+100+100)/6
 - 94,78%
 - Untuk Indikator Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu Tahun Anggaran 2021 menunggu hasil penilaian dari Inspektorat Kota Palu.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021**Tabel 3.4****Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel.	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu..	B	BB	BB	
Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD/Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS	100%	91,30	100%	94,78

Bersarkan Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021 dapat diketahui indikator kinerja utama Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD / Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS pada Tahun 2021 realisasi 94,78% dan capaian 94,78%, dibandingkan pada tahun 2020 dengan realisasi 91,30% dan capaian 91,30%. Sedangkan Indikator Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu 2020 mendapatkan Nilai BB dan 2021 menunggu hasil dari Inspektorat Daerah Kota Palu.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2016-2021

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2016-2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	Target Renstra	Realisasi	Capaian
1	2				
1	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu	Penilaian Inspektorat Kota Palu	BB		
	2	Jumlah program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah program pada RPJMD x 100%	100%	94,78	94,78
Jumlah indikator program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / jumlah indikator program pada RPJMD x 100%					
Jumlah target program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah target program pada RPJMD x 100%					
2	Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS	Jumlah program yang ada di PPAS yang sesuai dengan RKPD / jumlah program pada RKPD x 100%	100%	94,78	94,78
		Jumlah indikator program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah indikator program pada RKPD x 100%			
		Jumlah target program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah target program pada RKPD x 100%			

Bersarkan Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2016-2021 dapat diketahui indikator kinerja utama Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD/Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS pada Tahun 2021 realisasi 94,78% dan capaian 94,78%, sedangkan Indikator Utama Nilai Sakip Bappeda Kota Palu menunggu hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Palu.

3.1.4 Faktor Penyebab yang Mempengaruhi Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja serta Solusinya

Tidak tercapainya indikator kinerja utama Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD/Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS disebabkan antara lain :

- a. Terjadinya perubahan regulasi dan peraturan perundang – undangan terkait Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- b. Adanya perbedaan Program RPJMD yang masih mengacu pada Permendagri 13 tahun 2006 dengan Program kegiatan yang ada pada RKPD / PPAS yang telah mengacu pada Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050/3708 tahun 2020 dan Kepmendagri No 050/5889 tahun 2021
- c. Pada dokumen RPJMD yang masih mengacu pada Permendagri no 13 tahun 2006 terdapat 393 Program, pada RKPD tahun 2021 terdapat 352 program yang di konversi kedalam Permendagri 90 tahun 2019/Kepmendagri 050/3708 tahun 2022 menjadi 171 Program.
- d. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, dan penganggaran pembangunan daerah
- e. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program perangkat daerah
- f. Belum optimalnya penyiapan data dan informasi pembangunan daerah kota palu sehingga perlu untuk mengantisipasi hal hal tersebut, maka di perlukan :
 - a. Menerapkan sistim perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berbasis IT;
 - b. Memperbaiki pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja perangkat daerah; dan
 - c. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kota Palu yang akurat dan valid.

3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang di maksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja tahun 2021 dengan realisasi anggaran tahun 2021. Sejauh mana realisasi penggunaan anggaran yang digunakan dalam upaya mencapai target kinerja yang di inginkan tahun 2021. Secara garis besar bahwa capaian target kinerja tahun 2021 dengan capaian sebesar 94,78%, realisasi anggaran tahun 2021 untuk pencapaian target sebesar 4.633.530.611,- atau (95,62%) dari target belanja langsung Bappeda Kota Palu sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2021 yang menunjang pencapaian kinerja sejumlah Rp. 4.845.678.650,-, atau terdapat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 212.148039,- .

Rincian realisasi penggunaan anggaran tahun 2021 dengan realisasi capaian target kinerja tahun 2020 pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2021 dengan
Realisasi Capaian Target Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu	BB			40.431.350	40.313.145	99,71
Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD	100%	94,78%	94,78%	4.805.247.300	4.593.217.466	95,59%
	Tingkat keselarasan RKPd terhadap PPAS						

3.1.6 Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.7

Realisasi dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
		Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Koordinasi dan penyusunan RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA Bappeda	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Koordinasi dan penyusunan RKA-P SKPD	Jumlah dokumen RKA P Bappeda	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	1 dokumen	1 dokumen	100%
Program pPerencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan, Perencanaan dan Pendanaan	Analisis kondisi daerah permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah	Jumlah pelaksanaan pendampingan perencanaan pembangunan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah	4 Kali	4 Kali	100%
		Pelaksanaan konsultasi publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik/Tahapan penyusunan RPJMD	1 Kali	1 Kali	100%
		Koordinasi pelaksanaan forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forum SKPD	2 kali	2 kali	100%
		Pelaksanaan musrenbang kabupaten kota	Jumlah pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota	3 Kali	3 Kali	100%
		Penyiapan bahan koordinasi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
		Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
		musrenbang kecamatan	Musrenbang Kecamatan			
		Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen RPJMD, RKPD dan RKPD-Perubahan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah aplikasi Penyediaan data dan informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%
		Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	Jumlah dokumen laporan penyusunan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)	1 Doukmen	1 Doukmen	100%
		Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten kota	Jumlah Dokumen SIPD/Jumlah Dokumen Kinerja Ekonomi Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi pengendalian, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kabupaten kota	Jumlah dokumen LAKIP Kota Palu	13 Dokumen	13 Dokumen
	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah		Jumlah dokumen hasil monitoring pelaksanaan pembangunan daerah / dokumen RKPD yang terevaluasi	8 Dokumen	8 Dokumen	100%

Realisasi Anggaran

Belanja operasional merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan. Bappeda Kota Palu Tahun 2021 menganggarkan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

belanja langsung sebesar Rp. 10.565.681.508,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.156.020.949,- atau 96.12% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2021

NO	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
I	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	5.760.434.208	5.562.803.483	96,57
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	40.431.350	40.313.145	99,71
2	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	17.256.650	17.256.595	100
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	8.329.550	8.329.000	99,99
4	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	8.329.550	8.329.000	99,99
5	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.515.600	6.398.550	98,2
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	3.837.406.430	3.723.343.404	97,03
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.812.703.080	3.698.640.191	97,01
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	24.703.350	24.703.213	100
3	Administrasi umum perangkat daerah	510.340.560	509.200.030	99,78
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.790.200	2.749.000	98,52
2	Penyediaan bahan logistik kantor	83.893.460	83.860.960	99,96
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.603.500	6.546.025	99,13

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

NO	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.600.000	19.920.000	96,7
5	Fasilitas kunjungan tamu	26.784.000	26.484.000	98,88
6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	369.669.400	369.640.045	99,99
4	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.071.811.768	1.043.683.604	97,38
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.270.000	664.920	9,146
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	373.846.200	371.326.600	99,33
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	690.695.568	671.692.084	97,25
5	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	300.444.100	246.263.300	81,97
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	276.829.100	234.752.800	84,8
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	16.190.000	5.060.500	31,26
3	Pemeliharaan/rahabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	7.425.000	6.450.000	86,87
II	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	4.805.247.300	4.593.217.466	95,59
1	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	2.408.913.530	2.345.516.252	97,37
1	Analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah	994.893.725	973.118.725	97,81
2	Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	219.025.455	207.564.459	94,77
3	Pelaksanaan konsultasi publik	112.315.000	109.615.000	97,6
4	Koordinasi pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD	72.124.000	70.895.000	98,3

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

NO	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
5	Pelaksanaan musrembang kabupaten/kota	233.419.075	232.533.723	99,62
6	Penyiapan bahan koordinasi musrembang kecamatan	28.090.000	28.090.000	100
7	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	749.046.275	723.699.345	96,62
2	Analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	1.474.781.025	1.405.919.251	95,33
1	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	317.864.175	316.269.975	99,5
2	Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	640.416.200	594.177.498	92,78
3	Penyusunan profil pembangunan daerah kabupatankota	516.500.650	495.471.778	95,93
3	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	921.552.745	841.781.963	91,34
1	Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten kota	108.953.670	105.104.795	96,47
2	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	812.599.075	736.677.168	90,66
Jumlah		10.565.681.508	10.156.020.949	96,12

BAB IV
PENUTUP

Hasil analisis pencapaian kinerja Bappeda Kota Palu Tahun 2021 terhadap indikator kinerja utama yaitu Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD / Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS menunjukkan capaian kinerja sebesar 94,78 % atau dengan kinerja **Sangat Berhasil**.

Atas tercapainya hasil kinerja tahun 2021, Bappeda Kota Palu harus terus meningkatkan dan mempertahankan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun akan datang. Hal-hal penting yang harus ditingkatkan dalam masa mendatang agar peningkatan kinerja Bappeda Kota Palu benar menunjukkan indikator kinerja utama Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD / Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS indikator kinerja utama sebuah lembaga yang sangat strategis adalah sebagai berikut :

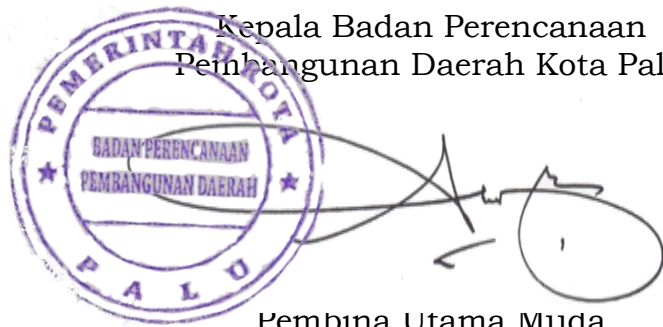
1. Membangun sistim Informasi *E-Planning, E-Sakip, E, Monev* dan *E-Data Base*, dan SIPD guna meningkatkan peran Bappeda Kota Palu dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah;
2. Konsistensi dalam menjalankan Tujuan / Sasaran yang akan di capai sesuai dengan target yang telah di tentukan dalam RPJMD Pemerintah Kota Palu dan Renstra Bappeda Kota Palu;
3. Memperbaiki pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja perangkat daerah; dan
4. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kota Palu yang akurat dan valid.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua rekan rekan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu yang telah mendukung hingga tersedia dan tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Palu Tahun Anggaran 2021.

Palu, 10 Februari 2022

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Palu



Pembina Utama Muda
Nip. 19720414 199203 1 004